

Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar Melalui Integrasi Materi Pembelajaran Lintas Bidang Studi

A. Pengantar

Perkembangan dunia pada milenium ketiga ditunjukkan dengan begitu banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan pandangan dan sikap politik masyarakat dunia yang ditunjang dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi secara revolusioner, yang telah mengubah wajah dunia menjadi sangat berbeda. Perkembangan iptek tersebut membuat kita melintasi abad dalam waktu yang sangat singkat. Secara budaya, politik demokrasi telah membuat manusia antar negara bisa saling mempengaruhi pandangan politik secara langsung. Misalnya, politik kesetaraan gender, Hak Azasi Manusia, Perburuhan, politik Otonomi Daerah dan lain-lain. Secara Individual, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi banyak manusia di dunia mempunyai akses dan kebebasan yang sangat besar untuk mendapatkan dan menyampaikan berbagai informasi tanpa dibatasi perbedaan suku, kewarganegaraan, agama, bahkan batas geografis.

Hal di atas tentu membawa konsekuensi positif dan negatif terhadap perkembangan peradaban manusia, khususnya perkembangan masyarakat dalam satu negara. Disintegrasi bangsa adalah isue yang sangat relevan dengan perkembangan perubahan dunia tersebut. Khususnya Indonesia dengan wilayah yang mencapai 6 juta Km², setara dengan luas wilayah negara Amerika Serikat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari kepulauan yang terdiri lebih dari 13.000 pulau dengan lebih dari 600 suku bangsa. Hal ini menjadikan negeri ini sangat rawan dengan ancaman disintegrasi. Sementara itu, pendekatan represif untuk mempertahankan integrasi bangsa melalui kekuatan senjata sudah sangat tidak populer dengan kondisi dunia sekarang. Bahkan, semakin tidak populer dengan alam demokrasi yang semakin mengglobal. Mohtar Mas'ood dalam Suwarsono dan Alvin Y. So (2000 : 151-153), mengidentifikasi bahwa melalui pendekatan represif pada masa Orde Baru (rezim Soeharto), Indonesia pernah menjadi negara yang Birokratik-Otoriter, seperti yang dirumuskan O'Donnell.

Pada saat Era Reformasi yang didahului dengan krisis Ekonomi (1997) berlanjut menjadi krisis multidimensional, bangsa Indonesia seperti terlepas dari belenggu yang membatasi gerak dan langkah bangsa ini, dalam berbagai segmen kehidupan. Karena itu,

berbagai 'doktrin' dan aturan produk rezim Soeharto seolah semuanya harus dienyahkan. Hal di ini berimbas pada dunia Pendidikan. Di antaranya terhadap mata pelajaran Sejarah, yang sempat 'digugat' masyarakat, untuk beberapa peristiwa yang dianggap sebagai dukungan politis terhadap rezim Soeharto. Misalnya topik tentang Serangan Umum 1 Maret dan peristiwa monumental yang berhubungan dengan G 30 S/PKI. Oleh karena itu, untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat tersebut, beberapa tujuan pembelajaran Sejarah pada saat itu diubah, dengan menerbitkan suplemen kurikulum Sejarah. Sehubungan dengan beberapa materi Sejarah yang dikritisi khalayak dan dipertanyakan objektifitasnya tersebut, menurut hemat penulis telah menjadi salah satu penyebab dikurangnya atau bahkan dihilangkannya beberapa bahan ajar (Content) yang bertujuan menumbuhkan dan memelihara semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Pada periode ini, mata pelajaran yang sempat 'merosot' prestisnya bukan hanya mata pelajaran Sejarah, tetapi juga PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Kedua mata pelajaran ini dianggap sebagai produk Orba, dimana masyarakat pada saat itu seperti 'alergi' terhadap hal-hal yang berbau 'indoktrinasi'. Karena itu, PKN dan Sejarah mengalami 'penggembosan' baik dari pengurangan muatan materi maupun alokasi waktu. Jika pada Orba, setiap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi selalu ada paket penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), setelah itu dipandang tidak diperlukan lagi.

Diketahui bahwa kekuatan politik menjadi unsur yang dominan dalam melahirkan sebuah kebijakan, termasuk dalam mengembangkan kurikulum. Di samping itu, ritual-ritual yang berupa seremonial menjadi sangat jauh berkurang. Contohnya, untuk PNS, upacara bendera setiap tanggal 17 tiap bulan menjadi tidak ada. Lagu-lagu kebangsaan, berbagai hymne dan lagu-lagu kepahlawanan pun menjadi sangat jarang dikumandangkan. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan ketika mata pelajaran Sejarah, sampai dengan sekarang tidak menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk (diujikan) dalam Ujian Negara (UN). Karena itu, tentu saja para siswa akan memandang Sejarah sebagai mata pelajaran yang kurang penting, atau malahan sama sekali tidak penting.

Kendati demikian, Fenomena ini oleh beberapa ahli sejarah disikapi secara positif. Perubahan dipandang sebagai sebuah realitas sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi secara dewasa. Berikut ini pendapat Hasan (2000) sehubungan dengan berubahnya pandangan kelompok masyarakat yang skeptis terhadap beberapa peristiwa sejarah :

Kebijakan politik baru, suasana kehidupan bangsa dan masyarakat memberi kesempatan kepada pengungkapan sumber dan/ atau dokumen yang sebelumnya

tidak diketahui atau diperkenankan, adanya suasana yang baru dapat diungkapkan mengenai kelahiran suatu peristiwa, atau suatu penafsiran baru tentang suatu peristiwa yang berbeda dari sebelumnya....

B. Dari Desentralisasi ke Sentralisasi

Sistem pemerintahan yang bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi yang bermuara pada kemunculan UU no 22/2000 tentang otonomi daerah menjadikan semua kebijakan yang 'serba otonom', termasuk otonomi sekolah, telah memberikan warna dan nafas baru. Dalam beberapa hal, bisa menjadi indikator tumbuh kembangnya era demokrasi, namun dalam hal yang lain akan menunjukkan sebuah kondisi yang stagnan mengingat kesiapan yang belum matang benar untuk sebuah kemandirian yang mendadak. Terutama, daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)nya kecil, tetapi warganya banyak. Tentu saja, hal ini akan berimbas pada aspek pendidikan masyarakat daerah tersebut.

Pada penghujung tahun 1997, Report of Conference on Indonesia's Economics Crisis melaporkan bahwa tingkat inflasi mencapai angka 70%, dengan tingkat suku bunga lebih dari 60%, juga merosotnya nilai rupiah terhadap dolar sampai dengan 80% (Edy Suandy Hamid, PR 23 Pebruari 1999). Inilah yang menyebabkan munculnya dalam waktu singkat kondisi krisis multi dimensi, yang diidentifikasi Al Chaidar (1988 100-120) dan Hamid (PR, 23 Pebruari 1999), meliputi krisis bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam waktu yang singkat pula, kesatuan negara Republik Indonesia yang diyakini memiliki perekat kuat melalui konsep Wawasan Nusantara, sejak jaman keemasan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Maha Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk (abad 15 M), terancam tercerai berai. Realitas Sosial memperlihatkan berbagai konflik sosial, seperti kerusuhan di daerah Jakarta, Medan, Katapang, Timor Timur, Banyuwangi, Aceh, Ambon, Irian Jaya dan Kalimantan Barat/Sambas. Karena itu, fenomena ini akan menempatkan kita berada pada titik yang rawan : "ancaman ke arah disintegrasi bangsa!"

Pendidikan kesejarahan merupakan proses enkulturasi dalam rangka nation character building. Melalui proses pelembagaan nilai-nilai yang positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, heroisme dan nasionalisme, nilai-nilai masyarakat industri dan nilai-nilai ideologi bangsa (Kartodirdjo, 1999 : 33 dalam Supardan : 2004). Jiwa nasionalisme adalah perekat yang sangat diandalkan untuk menghindari disintegrasi bangsa yang

disebabkan faktor-faktor tersebut di atas. Untuk itu, masih diperlukan peranan pemerintah dan para stakeholder untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan agar mata pelajaran-mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, yakni Sejarah mendapat perhatian yang cukup banyak, terutama dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sehingga, pendidikan sejarah tidak hanya sekedar pembelajaran yang bersifat teoritik idealisme yang konseptual, tetapi juga memiliki nilai praktis dan pragmatis bagi siswa, yang diidentifikasi Hasan (1999 :9) sebagai akibat dari pergeseran dalam filsafat pendidikan sejarah dari Perennialism yang menekankan 'transmission of the glorious past' ke arah posisi berbagai aliran filsafat seperti essentialism dan bahkan social reconstruction (Supardan : 2004).

Ancaman lain, selain dari faktor-faktor tersebut di atas, adalah efek dari berkembangnya teknologi informasi. Sebagai jantung dari globalisasi, Yulifar (2004, Majalah Entrepreneur, Edisi 8/thn I) mengatakan bahwa :

Globalisasi, dimaknai sebagai dunia yang nyaris tanpa sekat. Pada detik yang sama, peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun dapat kita ketahui dengan cepat, karena kecanggihan teknologi informasi. Kita akan dikepung dari berbagai penjuru oleh berbagai informasi...

Dunia yang nyaris tanpa sekat, di mana batas-batas geografis secara kasat mata tidak lagi menjadi penghalang akan menimbulkan perubahan sosial secara cepat dengan berbagai dampak yang dikhawatirkan. Jika wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme tidak kokoh, bukan tidak mungkin akan muncul kelompok generasi yang lebih membanggakan negara lain, Sehingga kecintaan dan perasaan ingin membangun bangsa menjadi menipis. Dikhawatirkan muncul generasi 'pemimpi' yang tidak membumi. Oleh karena itu, jika wawasan kebangsaan dimiliki, disertai rasa nasionalisme yang kuat, maka teknologi informasi yang senantiasa berkembang pesat tidak lagi menjadi sesuatu yang mengancam, tapi akan sesuai dengan yang diharapkan Jafar Elly, bahwa teknologi Informasi seyogyanya menjadi alat pendukung untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan (Jafar Elly dalam Koran Tempo 23 Mei 2008).

Sebenarnya, dalam kurikulum dan pengajaran di Indonesia, bukan hanya mata pelajaran Sejarah yang 'bertanggung jawab' dalam membangun nasionalisme bangsa. Paling tidak, pada kurikulum 1984 pernah ada mata pelajaran yang di dalamnya semata-mata ditujukan untuk memahami wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang sangat kental 'aroma' pengadopsian dari kurikulum yang dikembangkan di Amerika, dengan

label Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang disinyalir sebagai kehendak kuat dari Nugroho Notosusanto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yang mendapat gelar Doktor Ilmu Sejarah. Pada kurun waktu yang sama, mata pelajaran PMPKN (Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam bahan ajarnya jg berpijak pada peristiwa-peristiwa Sejarah. Oleh karena itu, di Tingkat Sekolah Menengah pernah populer istilah "tri in one". Istilah untuk menggambarkan bahwa cukup satu buku teks, atau satu kali belajar untuk menghadapi 3 mata pelajaran. Sungguh suatu kondisi yang memperlihatkan 'kelemahan' dalam pengorganisasian bahan ajar, sebagai 'biang keladi' terjadinya overlap tersebut.

Melihat perjalanan yang panjang tentang pasang surut mata pelajaran Sejarah di bawah kendali para birokrat dan stakeholder, sudah saatnya kita mengembangkan kurikulum pembelajaran sejarah yang memperhatikan kondisi-kondisi mutakhir negeri ini, baik dari segi sosio kultural, kebijakan politik dalam bidang pendidikan yang mengarah pada otonomi daerah, dalam skup yang lebih kecil adalah otonomi sekolah, maka model pembelajaran pun harus bersifat inovatif. Satu di antara yang dikembangkan adalah pengintegrasian materi sejarah melalui lintas disiplin mata pelajaran.

C. KTSP : Jawaban Terhadap Berbagai Tantangan Pada Era Otonomi Daerah (desentralisasi).

Sejalan dengan berbagai fenomena di atas dan untuk menjawab berbagai perubahan tersebut, pada pertengahan tahun 2006, pemerintah kita (Diknas) mulai memberlakukan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum di tingkat institusi, yang dikenal dengan istilah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum ini menghendaki agar para guru mengembangkan sendiri petunjuk serta strategi pembelajaran, sumber/bahan dan sistem penilaian yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sehubungan dengan itu, Desfina (2008) mengatakan bahwa :

Kurikulum memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan sendiri silabus pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungannya. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi di sekitar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, guru dan ekolah menyusun sendiri dlam menentukan kandungan/content kegiatan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan sekolah.

Memperhatikan karakteristik dari Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) tersebut, maka pengembangan model pembelajaran sejarah yang integratif dalam pengorganisasian materi secara lintas bidang studi menjadi sangat memungkinkan, karena tersedianya kewenangan dan keleluasaan pihak guru dan sekolah untuk menjadi pengembang kurikulum yang otonom. Satu hal yang sangat berbeda, manakala pendidikan kita berada dalam pengaruh yang serba terpusat (sentralisasi).

Sebelum para guru dan pihak sekolah mengambil langkah untuk pengembangan model pembelajaran, seyogyanya mereka harus memperhatikan beberapa teori yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran, juga termasuk konsep-konsep di dalam mengembangkan sebuah model pembelajaran. Berikut ini diungkapkan beberapa konsep yang dimaksud.

D. Kurikulum dan Pengajaran

Telah banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan kurikulum. Lazimnya kurikulum dipandang sebagai sebuah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah (Nasution, 1999 : 5). Thomas S. Curtis dan Wilma W. Bildwell (1976 : 143) mengatakan bahwa terdapat interpretasi istilah yang beragam mulai dari pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum terdiri atas semua pengalaman yang dipunyai peserta didik yang diperoleh di bawah bimbingan sekolah, sampai pada perdebatan bahwa kurikulum adalah hasil belajar yang sudah lebih dahulu direncanakan oleh pendidik.

Salah satu pegangan dalam pengembangan kurikulum ialah prinsip-prinsip yang dikemukakan Ralph Tyler (1949), dalam Nasution (1999), yang mengemukakan bahwa kurikulum ditentukan oleh empat faktor atau azas utama, yakni :

1. Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan guru-guru (aspek filosofis)
2. Harapan dan kebutuhan masyarakat (orang tua, kebudayaan masyarakat, pemerintah, agama, ekonomi/aspek sosiologis).
3. Hakekat anak, yang meliputi perkembangan fisik, mental, psikologi, emosional, sosial serta cara anak belajar/aspek psikologis).
4. Hakekat pengetahuan atau disiplin ilmu (bahan pelajaran).

Sehubungan dengan azas-azas yang diungkapkan Tyler tersebut, maka pengembangan kurikulum baik keseluruhan maupun hanya sebagian dari komponen-

komponen kurikulum, bagaimanapun juga harus memperhatikan ke-4 azas tersebut. Demikian juga di dalam mengembangkan sebuah model pembelajaran yang akan mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.

Bicara tentang model pada dasarnya merujuk pada penyerderhanaan suatu sistem yang kompleks yang diwujudkan dalam bermacam-macam bentuk model seperti suatu tipe atau disain, deskripsi atau analogi yang digunakan untuk proses visualisasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Sejalan dengan itu, Joice, Weil dan Calhoun (2000) mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola atau perencanaan yang berifat menyeluruh ataupun yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran tertentu : “A models of teaching is a plan or pattern t can be used to shaped curriulum (long term courses of studies),to desaign instructional material,and to guide instruction in the classroom and other setting.”

Sehubungan dengan model pembelajaran tersebut, Joice, Weil dan Calhoun (2000) mengajukan kriteria bahwa model pembelajaran memiliki unsur sbb:

1. Tujuan (aims)
2. Langkah-langkah kegiatan atau syntax
3. Peranan guru dan murid (the social system)
4. Prinsip-prinsip reaksi seperti membimbing dan menggunakan berbagai metode (principles of reaction)
5. Dukungan sistem seperti alat bantu (support system) dan evaluasi (evaluation).

E. Karakteristik dan Kebutuhan siswa Sekolah Dasar

Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar, di samping lembaga pendidikan luar biasa dan yang berciri khas agama Islam (UUSPN,1990). Selajutnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar berlangsung selama 6 tahun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28/1990 menyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Yulifar,1993). Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar tersebut pemerintah menyusun kurikulum pendidikan dasar., yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan

karakteristik anak didik. Usia anak Sekolah Dasar berkisar antara 6 sampai dengan 12 tahun. Pada usia ini, anak berada pada tahap operasional konkrit.

Pengembangan model pembelajaran ini sebenarnya bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Tetapi, akan lebih efektif jika jenjang Sekolah Dasar menjadi prioritas utama. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pada jenjang Sekolah Dasar kelas tinggi perkembangan kognitif anak sudah masuk pada periode realisme kritis (Oswald Kroh dalam Kartono, K, 1995). Pada periode ini, anak didik akan memiliki dorongan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Demikian juga dalam perkembangan kemampuan berbahasa, terutama dalam penguasaan perbendaharaan kata-kata sangat pesat. Di samping itu, sampai saat ini, praktek-praktek di lapangan, penyampaian materi masih disampaikan oleh guru bidang studi. Beberapa SD swasta yang berkategori "full day school" atau sekolah unggulan yang mengklaim sebagai sekolah alam maupun sekolah interaktif, sudah menerapkan model pembelajaran seperti ini. Kendati demikian, karena model ini masih terhitung baru, dan bergantung pada kreatifitas guru dan sekolah, diperlukan sebuah model atau disain model yang bisa dijadikan referensi.

Pengembangan model pembelajaran ini diharapkan menghasilkan sebuah model pembelajaran sebagai alternatif untuk digunakan di sekolah-sekolah yang dalam tahun-tahun terakhir ini dimungkinkan dengan adanya otonomi sekolah/kampus, seiring dengan tuntutan-tuntutan politik yang serba otonom, terutama sejak diundangkannya UU Otonomi Daerah pada tahun 2000 (Restu Agung : 2000). Di samping itu, Pengembangan model pembelajaran ini diharapkan akan mendukung ke arah pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran berbagai bidang studi di tingkat Sekolah Dasar yang bersifat komprehensif, holistik dan integratif.

F. Model Pembelajaran Sejarah yang Integratif Melalui Lintas Bidang Studi :

Sebuah Alternatif untuk menanamkan nasionalisme siswa

Di dalam mengembangkan bahan ajar, dalam kurikulum konvensional yang masih digunakan kebanyakan para guru, lazimnya menggunakan pendekatan yang dikenal dengan istilah Bidang Studi (pendekatan subjek atau disiplin ilmu). Bahan diorganisasikan dalam label sbb : Matematika, Sains (Kimia, Fisika, Biologi), Sejarah, Geografi, Ekonomi, IPA atau IPS. Pendekatan yang lain, di antaranya dikenal dengan istilah interdisipliner. Hal ini berpijak pada realitas sosial yang memerlukan kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan interdisipliner yang berusaha mengintegrasikan beberapa disiplin mata

pelajaran yang saling berkaitan agar siswa memahami ilmu pengetahuan secara integral, disebut juga pendekatan *Broad field*. Sehubungan dengan itu, Nasution (1999 :45) memberikan contoh pemilihan topik bagaimana bahan ajar diorganisasikan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu mulai dari ilmu geografi (lokasi rumah), ekonomi (biaya rumah tangga), matematika (pengeluaran rutin per hari dst), Sejarah (di mana seseorang tinggal dan belajar pada masa sebelumnya), sains (bagaimana rumah melindungi manusia dari pengaruh alam). Berikut ini adalah contoh pendekatan Broadfield untuk jenjang Sekolah Dasar, dalam kajian IPS dengan Topik tentang 'lingkungan rumah' atau 'orang yang berjasa di rumah'. Para Guru dapat membuat unit yang dijadikan bahan pembelajaran, yakni :

1. Letak rumah (dibuat peta).
2. Tukang pos yang mengantar surat.
3. Tukang sayur yang menjajakan macam-macam makanan (sayur, ikan, daging, dan lain-lain).
4. Tukang angkut sampah yang datang dengan truk.
5. Tukang koran yang mengantarkan koran tiap pagi dan majalah sekali seminggu.
6. Ibu yang tiap hari mengurus rumah tangga.
7. kakak yang turut membantu ibu memasak, membersihkan rumah.
8. Bibi yang masak, sapu halaman.
9. Biaya rumah tangga tiap hari, tiap bulan untuk macam-macam pengeluaran.
10. Pendapatan tukang sayur, tukang pengantar koran, dan lain-lain.

Menyimak uraian di atas, diketahui bahwa secara teoritis, integrasi mata pelajaran Sejarah ke dalam bidang-bidang kajian mata pelajaran lain, sangat dimungkinkan. Di Indonesia, selama ini integrasi materi hanya dilakukan melalui mata pelajaran serumpun, misalnya dalam kajian IPS (walaupun dalam prakteknya sering tidak konsisten, tetap disampaikan dalam konteks disiplin ilmu). Di samping itu, model ini, pada gilirannya bukan hanya melibatkan guru dan siswa saja, tapi juga akan melibatkan pihak orang tua. Sebagai contoh :

Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, untuk topik membaca sebagai mikro organisasi bisa menggunakan beberapa cerita Sejarah. Misalnya Peristiwa Bandung Lautan Api. Atau tugas mengarang dengan topik esey tentang peristiwa sejarah yang bisa dipilihkan guru, atau diserahkan pada kreativitas siswa. Menurut salah seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah yang pernah menerapkan model ini, proses pembelajaran

menjadi lebih efektif karena memudahkan siswa dalam memahami penguasaan bahasa, baik dari segi comprehension, terminologi, vocabulary maupun dalam kompetensi dan topik-topik yang lain.

Dalam pelajaran kesenian, peristiwa-peristiwa sejarah bisa dijadikan sebagai bahan untuk topik pelajaran Drama. Misalnya, perang-perang Daerah (Perang Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, dll). Atau peristiwa Proklamasi, Runtuhnya Orde Baru diganti Era Reformasi, peristiwa Romusha dll. Begitu juga untuk mata pelajaran yang lain, yang memungkinkan untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran Sejarah. Dalam pelajaran menggambar, para tokoh/pahlawan bangsa, cuplikan pertempuran dll. bisa dijadikan pilihan sebagai objek lukisan/menggambar.

Berikut ini contoh PR untuk anak kelas V SD di salah satu Sekolah Dasar Interaktif di Bandung :

”Buatlah gambar yang menceritakan Perang Diponegoro, jangan lupa tuliskan waktu dan tempat peristiwa di bawah gambar. Diskusikan kejadian tersebut dengan orang tuamu!”

Memperhatikan PR tersebut di atas, maka siswa akan berusaha untuk mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan Peristiwa Perang Diponegoro. Hal yang paling mudah, mereka akan membuka buku teks Sejarah (IPS) yang berkaitan dengan PR-nya tersebut. Dialog interaktif akan terjadi dengan orang tua masing-masing. Hasil diskusi itu akan menjadi bekal peserta didik di dalam menyelesaikan tugasnya tersebut. Upaya lain, bagi para siswa di perkotaan, di samping dari buku teks Sejarahh, mereka akan mencari informasi melalui media internet. Anak-anak kita sudah sangat terbiasa dan akrab dengan dunia ini.

Untuk jenis soal cerita dalam Matematika, siswa bisa dihadapkan pada bagaimana menghitung jarak tempuh (peristiwa Bandung Lautan Api), menghitung usia tokoh/pahlawan ketika meninggal, juga dapat mengoprasikan penjumlahan, perkalian dan pembagian yang mengambil latar belakang dari peristiwa-peristiwa sejarah.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam implementasinya, di samping faktor-faktor yang berupa dukungan, pengembangan model ini kemungkinan akan menemui beberapa hambatan. Dukungan terbesar datang dari sistem kurikulum itu sendiri, seperti yang telah diungkapkan di bagian awal tulisan ini. Dukungan yang lain datang dari para guru, pihak sekolah dan para orang

tua yang mengapresiasi model ini sebagai sebuah model pembelajaran yang cukup efektif. Beberapa tugas (PR) yang diberikan kepada siswa membuat para orang tua berpartisipasi aktif menjadi bagian dari proses pembelajaran putera-puteri mereka (seperti contoh PR untuk siswa kelas V SD dalam pelajaran Menggambar).

Kendati demikian, hambatan bisa datang dari pihak guru itu sendiri. Misalnya karena secara pribadi dia tidak menyukai materi Sejarah, sehingga tidak memiliki dorongan untuk berkreatifitas. Atau karena guru tersebut tidak merasa punya kewajiban untuk menyokong terbentuknya jiwa nasionalisme siswa. Demikian juga para orang tua yang sudah sarat dengan berbagai kesibukan, atau karena keterbatasan dalam wawasan kesejarahan, yang dalam kasus tertentu akan membuat siswa *demotivasi*. Misalnya, ketika anak didik dihadapkan kepada Pekerjaan rumah (PR), yang memerlukan bimbingan orang tua mereka. Di samping itu, Keterbatasan fasilitas, belum memadainya anggaran pendidikan dan daya beli masyarakat yang semakin rendah, akan dijadikan alasan oleh sekolah-sekolah tertentu untuk menghindari penerapan model ini. Padahal, dengan hanya mengandalkan kepada kreatifitas dan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari pihak sekolah serta dari para guru tentang pentingnya rasa cinta pada tanah air (nasionalisme), akan merupakan komponen yang cukup besar untuk menerapkan model ini. Kenyataannya, pada saat ini, model pembelajaran lintas disiplin kebanyakan diterapkan di sekolah-sekolah berkategori *full day school*, atau semacam sekolah yang berorientasi pada lingkungan, yang sementara ini dikenal cukup mahal dalam pembiayaan pendidikannya.

Diketahui bersama, bahwa bagi sekelompok siswa, juga para orang tua murid, pelajaran Sejarah diasumsikan sebagai pelajaran yang tidak cukup penting. Mata pelajaran ini dipandang hanya berisi angka tahun dan deretan peristiwa yang harus dihapalkan. Metode penyampaian yang mengandalkan ceramah, atau padat dengan muatan materi membuat para siswa merasa bosan. Sebagian di antaranya terkadang tidak bisa membedakan antara Sejarah dengan dongeng, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan mitologi. Memang bukan semata-mata kesalahan mereka, guru Sejarah yang mengajar tanpa daya tarik dan kurang kreatif dalam strategi pembelajaran menjadi bagian dari penyebab fenomena tersebut. Apa lagi mata pelajaran ini tidak menjadi bagian dari mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Tidak mengherankan jika Sejarah terkadang dipandang hanya dengan sebelah mata, oleh sebagian siswa juga para orang tua. Diharapkan, penggunaan model pembelajaran Sejarah yang interdisipliner ini membuat para siswa dapat

mengapresiasi kajian sejarah lebih mendalam lagi, yang pada gilirannya akan mengubah pandangan mereka terhadap peristiwa Sejarah, sebagai sebuah fakta yang hidup, aplikatif, tidak kering, dan cukup penting untuk dipelajari. Dengan demikian, di masa yang akan datang, kondisi ini akan mendorong mereka untuk lebih mendalami bidang Sejarah sebagai sebuah kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban semata.

H. Strategi Diseminasi

Beberapa contoh di atas, tentang aplikasi dari model pembelajaran Sejarah yang lintas disiplin, telah dibahas. Diasumsikan bahwa implementasi model ini dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran. Mungkin akan timbul pertanyaan : sebanyak itukah bidang studi 'dititipi' muatan untuk membentuk jiwa nasionalisme siswa? Tidakah akan menjadi overlapping? Atau akan membuat bosan para siswa! Di samping itu, akan sulit mengukur sampai di mana keberhasilan pembentukan wawasan dan jiwa nasionalisme siswa dll.

Dalam mengatasi beberapa asumsi tersebut, penting untuk dilakukan upaya ke arah peningkatan wawasan para guru dalam penggunaan model pembelajaran tersebut. Kemudian, disain model yang aplikatif perlu dikembangkan untuk dijadikan referensi para guru. Misalnya membentuk forum diskusi semacam FGD (focus Group Discussion), yang diharapkan dapat melahirkan sebuah konsep atau rancangan dan bahkan model yang bisa dijadikan acuan. Forum ini bisa terbentuk secara informal ataupun secara formal. Karena itu, dukungan secara vertikal (dari Diknas) atau dari para pemangku kebijakan akan menjadi sebuah kekuatan dalam mendesiminasikan model pembelajaran sejarah yang lintas disiplin ini. Sehingga akan terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam menentukan pilihan dan jumlah mata pelajaran termasuk rancangan evaluasinya. Karena itu, langkah ini diharapkan akan cukup efektif, di dalam menangani aspek-aspek hambatan tersebut di atas.

Pada jenjang sekolah menengah, akan terjadi komunikasi interaktif antara para guru yang tergabung dalam MGMP mata pelajaran tertentu dengan komunitas baru di luar kelompok MGMP-nya, termasuk kelompok MGMP Sejarah. Sehingga pilihan-pilihan materi menjadi terarah dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan atau indikator-indikator mata pelajaran yang bersangkutan.

I. Penutup

Berdasar uraian tersebut di atas, diketahui bahwa pengembangan model pembelajaran Sejarah melalui integrasi lintas disiplin baru diterapkan di beberapa sekolah.

Sekolah-sekolah yang dimaksud terutama yang berada di perkotaan dan berkategori sekolah unggulan, fullday school, sekolah alam atau sekolah interaktif. Sebagai sebuah model pembelajaran yang terhitung baru, masih perlu upaya untuk mendesiminasikan konsep dan perancangan disain yang implementatif untuk dijadikan referensi para guru.

Dalam Kurikulum yang dikenal dengan sebutan KTSP, pengembangan model ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif pilihan model pembelajaran yang interdisipliner. Untuk itu, diperlukan kreatifitas dan kemauan kuat dari para guru. Pembentukan forum-forum diskusi semacam FGD (Focus Group Discussion) akan menjadi salah satu alternatif dalam upaya desiminasi model ini. Sehingga, pembentukan jiwa nasionalisme siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran Sejarah saja, tetapi tanggung jawab kita semua : mulai dari para guru, sekolah, orang tua dan pemerintah. Sehingga, kekhawatiran tentang generasi yang tidak berorientasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tidak lagi menjadi satu hal yang mencemaskan. Penyampaian materi pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar yang masih mengandalkan guru bidang studi, paling tidak untuk tahap awal, diasumsikan akan lebih mudah untuk diterapkan. Sekalipun demikian, pada jenjang yang lebih tinggi, model pembelajaran ini bisa juga diimplementasikan. Semua bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak.

Kuala Lumpur, akhir Mei 2008

Dra. Leli Yulifar, M.Pd.

Datar Pustaka

Al Chaidar (1998). *Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*,

Jakarta : Darul Falah.

Alvin Y. So, Suwarsono, (2000) *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Bandung, LP3ES

Best, J.H. (1978) *Research in Education*, Third Edition, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited

Curtis, Thomas. E dan Bidwell, Wilma W. 1976, : *Curriculum and Instruction for Emerging Adolescents*, New York, Addison Wesley

Desfina. (2008). *Pendidikan Tari : Kajian Tari Kreatif di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Jawa Barat*, makalah.

- Edi Suandi Hamid. (1993). *Road Show Dialog Ekonomi-Politik*, PR 23 Pebruari 1999
- Elly Jafar (2008), *Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Teknologi Informasi* (Artikel), Koran Tempo.
- Hasan, S. Hamid (2000) *Suplemen Kurikulum Sejarah di Indonesia : Beberapa Isu kontroversial*, Historia No.2 Vol I, Tahun 2000.
- Joice, B., Weil, M. and Calhoun, E. (2000) *Models of Teaching*, Sixth Edition, Boston: Allyn and Bacon
- Kartodirdjo, Sartono (1999) "*Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah*", dalam *Sejarah*, 8, Jakarta: MSI dan Arsip Nasional RI.
- Nasution, S (1989) *Kurikulum dan Pengajaran*, Bandung Bumi Aksara
- Yulifar, Leli (2001) *Berbagai Fenomena ke Arah Disintegrasi Sosial di Indonesia*, Makalah, Bandung, Universitas Padjadjaran
- Yulifar, Leli (1993) *Tujuan Kurikuler IPS Sekolah Dasar Ditinjau dari Kriteria Pengembangan Tujuan serta Kontribusinya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Dasar*, Makalah, Bandung, IKIP
- Sumantri, Mulyani ((1988), *Kurikulum dan Pengajaran*, Dep P&K, Jakarta
- Undang Undang Otonomi Daerah (2000), Jakarta, Restu Agung
- UUSPN dan Peraturan Pelaksanaannya (1992), Sinar Grafika, Jakarta